

## ISU-ISU KONTEMPORER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

**Hasan Khariri**

IAIN Syech Nurjati Cirebon

[Hasankhariri5@gmail.com](mailto:Hasankhariri5@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims first, to determine the objectives of Islamic education management. Second, to understand the management process of Islamic education in institutions, especially Islamic institutions. Third, to find out contemporary issues in Islamic education management today. This research uses a literature review method. The steps for this research are to collect literature sources that support the research, read and analyze the literature, then process the research material into a literature study. The results of this research are first, the aim of Islamic education management is to realize an effective and efficient educational process in achieving the goals of Islamic education. In general, the objectives of Islamic education management can be categorized into two, namely: 1) forming human beings, and 2) preparing generations of Muslims. Second, the Islamic education management process includes: 1) planning, 2) organization, 3) leadership, 4) control, 5) Islamic principles, namely: the principle of monotheism, the caliphate principle, the principle of ta'awun, and the principle of ihsan. Third, contemporary issues in Islamic education management include: 1) challenges of globalization, 2) quality of teaching staff or human resources, 3) changes in curriculum, 4) learning methods that have not been innovated, 5) inadequate facilities and infrastructure, 6) financial management which is not yet transparent, 7) Lack of cooperation with other parties, and 8) funding.*

**Keywords:** Contemporary Issues, Islamic education management.

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui tujuan manajemen pendidikan Islam. Kedua, untuk mengetahui proses manajemen pendidikan Islam di lembaga terutama lembaga keislaman. Ketiga, untuk mengetahui isu-isu kontemporer manajemen pendidikan Islam saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Langkah-langkah penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian, membaca serta menganalisis literatur, lalu mengolah bahan penelitian menjadi kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, tujuan manajemen pendidikan Islam untuk mewujudkan proses pendidikan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Secara umum, tujuan manajemen pendidikan Islam dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) membentuk insan kamil, dan 2) menyiapkan generasi umat Islam. Kedua, proses manajemen pendidikan Islam mencakup: 1) perencanaan, 2) perorganisasian, 3) kepemimpinan, 4) pengendalian, 5) prinsip keislaman yaitu: prinsip taubid, prinsip khalifah, prinsip ta'awun, dan prinsip ihsan. Ketiga, isu-isu kontemporer manajemen pendidikan Islam meliputi: 1) tantangan globalisasi, 2) kualitas tenaga pendidik atau SDM, 3) pergantian kurikulum, 4) metode pembelajaran yang belum inovatif, 5) sarana dan prasarana yang belum memadai, 6) manajemen keuangan yang belum transparan, 7) Kurangnya kerjasama dengan pihak lain, dan 8) pendanaan.*

**Kata Kunci :** Isu-isu Kontemporer, Manajemen pendidikan Islam.

## **PENDAHULUAN**

Berbicara tentang manajemen pendidikan Islam memiliki latar belakang yang kompleks. Pertama, pendidikan Islam memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan. Tujuan ini membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan terencana. Kedua, pendidikan Islam melibatkan berbagai komponen, seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana,

dan dana. Komponen-komponen ini perlu dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Pendidikan Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan-tantangan ini membutuhkan pengelolaan pendidikan yang adaptif dan inovatif.

Kemudian, manajemen pendidikan Islam pada taraf sumber daya yang terbatas menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan Islam dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan maksimal. Karena isu-isu yang ada di masyarakat bahwa lembaga pendidikan berlandaskan keislaman lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan umum. Seperti pengelolaan dana yang kurang efektif banyak lembaga pendidikan Islam yang masih mengalami kekurangan dana dan sumber daya keuangan, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Sarana dan prasarana kurang lengkap seperti fasilitas dan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Namun, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang belajar yang sempit, peralatan belajar yang tidak lengkap, dan akses teknologi yang terbatas. Kemudian kualitas tenaga pendidik tidak profesional pada nilai-nilai moralitas di masyarakat, dan metode pembelajaran yang digunakan di lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kurikulum dan metode pembelajaran yang belum tepat dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Hal ini, agar manajemen pendidikan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam pengelolaan pendidikan Islam agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita Islam.

Menurut Mujamil Qomar, perbedaan pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat diidentifikasi dari perspektif manajemennya.<sup>1</sup> Dari segi konsep manajemen pendidikan Islam memiliki nilai-nilai utama yang menjadi patokan dalam pembelajaran maupun pelayanan. Seperti materi ajar masih berpusat pada bidang-bidang studi agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning), dan pelayanan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga, sistem manajemen yang digunakan akan menghasilkan lembaga yang berkualitas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan suatu metode analisis deskriptif yaitu analisis data tanpa adanya uji statistik untuk mendeskripsikan secara lebih rinci terkait informasi yang telah disampaikan. Adapun analisis deskriptifnya yaitu menggunakan berbagai sumber dari beberapa literatur dan artikel sebagai bahan analisis permasalahan penelitian untuk menjelaskan dan menggambarkan sebenarnya bagaimana isu-isu dalam manajemen pendidikan Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data sekunder yang telah didapatkan dari hasil studi literatur berbagai jurnal, buku, dokumentasi, data catatan ilmiah

terkait yang relevan dengan penelitian dan sumber data yang diolah untuk menghasilkan data baru sebagai pendukung bukti penelitian yang dilakukan.<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, pengambilan studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber akademik yang relevan dengan masalah penelitian. Analisis pengolahan dari berbagai sumber data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara dibaca, dipelajari, lalu dianalisis dan dibandingkan dengan berbagai sumber literatur serta menginterpretasikan hasil analisis data tersebut, sehingga didapatkan analisis data untuk dapat menjawab semua berbagai permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Tujuan Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang diambil dari kata kerja manage yang berati mengemudikan, mengurus, dan mermerintah.<sup>3</sup> Sedangkan manajemen secara umum adalah suatu usaha, merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>4</sup> Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa “manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain.” Oleh sebab itu maka berdasarkan pengertian tersebut, ada tiga hal, yang perlu diperhatikan dalam manajemen yaitu pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. kedua, manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau keterampilan me-manage. Ketiga, manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional bisa me-manage secara efektif dan efisien.

Sedangkan manajemen pendidikan Islam merupakan aktifitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen pendidikan Islam yang efektif dan efisien dapat menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan produktif.<sup>5</sup> Implementasi sistem informasi telah banyak mendapat kemajuan, selain itu masih terdapat masalah seperti data yang tidak *up-to-date*, kapasitas pengelola sistem informasi sekolah atau kabupaten dan lemahnya pengelolaan sistem informasi pada level terendah.<sup>6</sup>

---

Menurut Mujamil Qomar mengartikan sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen harus mengutamakan pengelolaan secara Islami, sebab disinilah yang membedakan antara manajemen Islam dengan manajemen umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di definisikan bahwa manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Fremont mengatakan bahwa manajemen secara aplikatif dapat berfungsi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mengordinir sumber daya manusia, material, dan keuangan kearah tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien.
2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan (individu) dan sasaran bersama (kolektif).
4. Melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, memberdayakan sumber daya manusia, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi.
5. Menciptakan fasilitas hubungan antar-pribadi, informasi, dan memutuskan permasalahan yang timbul antar mereka. Fungsi manajemen tersebut dapat ditemukan dalam semua bentuk organisasi yang termasuk didalamnya organisasi pendidikan, meskipun fungsi manajemen pendidikan memiliki cakupan yang lebih spesifik.

Dengan mengetahui identitasnya dan juga kebutuhan tentang manajemen tentu akan dapat menentukan apa tujuan manajemen itu sendiri. Mengingat manajemen sebenarnya adalah alat dari suatu organisasi, maka adanya alat tersebut tentunya memiliki tujuan. Lembaga pendidikan Islam bisa dikategorikan sebagai lembaga industri mulia (nobel industri) karena mengembang misi ganda yaitu profit sekaligus sosial. Misi profit yaitu, untuk mencapai keuntungan, ini dapat dicapai ketika efisiensi dan efektifitas dana bisa tercapai, sehingga pemasukan (income) lebih besar daripada biaya operasional. Misi sosial bertujuan untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai luhur. Misi kedua ini dapat dicapai secara maksimal apabila lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki modal human-capital dan social capital yang memadai dan juga memiliki tingkat keefektifan dan efisiensi yang tinggi. Itulah sebabnya mengelola lembaga pendidikan Islam tidak hanya dibutuhkan profesionalisme yang tinggi, tetapi juga misi niat suci dan mental berlimpah, sama halnya dengan mengelola noble industry yang lain, seperti rumah sakit, panti asuhan, yayasan sosial, lembaga riset atau kajian dan lembaga swadaya masyarakat.

Sumber daya pendidikan Islam itu setidak-tidaknya menyangkut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk di dalamnya tenaga administrasi), kurikulum

atau program pendidikan, sarana/prasarana, biaya keuangan, informasi, proses belajar mengajar atau pelaksanaan pendidikan, lingkungan, output dan outcome serta hubungan kerjasama atau kemitraan dengan stakeholder dan lain-lain, yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, materil, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Sumber daya yang dimobilisasi dan dipadukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya meliputi apa yang disebut 3 M (man, money, dan material), dan semua itu tidak hanya terbatas yang ada di sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi Islam. Berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait baik kedalam maupun keluar sangat membantu dan menentukan kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya, itulah proses dari manajemen. Yang harus disadari adalah bahwa pemahaman manusia terhadap al Qur'an, bagaimanapun sepenuhnya bersandar pada kapasitas akal, dan apapun yang bersandar pada akal tersebut tidak pernah menjadi hal yang mutlak, jadi sepenuhnya persoalan akal dan kualitasnya dalam memahami al-Qur'an dan seberapa jauh kemampuan akal untuk kajian dan interpretasi secara tepat dalam konteks tertentu. Untuk itulah dalam pembahasan ini penulis mencoba mensinergiskan dan mengungkap secara langsung bahwa manajemen pendidikan Islam sesungguhnya dapat kita kaji dan kita interpretasikan dengan al-Qur'an jika akal kita mau berpikir. Karena sesungguhnya al-Qur'an sendiri menjelaskan tentang hal itu.

Dengan memahami tujuan manajemen secara umum, maka akan terlihat bahwa manajemen tidak saja hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan urusan intern organisasi, akan tetapi urusan ekstern juga menjadi medan kerja manajemen. Teori ini sangat tepat mengingat stakeholders (pihak yang terkait) sebuah organisasi tidak hanya anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Akan tetapi seluruh pihak yang terkait di luar organisasi menjadi bagian yang tidak tampak dalam kegiatan organisasi tersebut. Lembaga pendidikan mempunyai stakeholders tidak hanya siswa dan guru saja. Akan tetapi orang tua murid, masyarakat, lapangan pekerjaan, dan lembaga pendidikan berikutnya menjadi bagian dari stakeholders yang harus diperhatikan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu manajemen berfungsi untuk menghubungkan kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masing-masing stakeholders.

Selain itu, menurut Mujamil Qomar, bahwa manajemen pendidikan Islam memiliki tujuan satu kesatuan sistem yaitu:

1. Proses pengelolaan lembaga pendidikan islam secara Islami.
  2. Objek manajemen secara khusus yaitu menangani lembaga pendidikan Islam dengan keunikannya. Seperti memaparkan cara-cara pengelolaan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan lainnya.
  3. Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam menghendaki adanya sifat inklusif dan eksklusif.
-

4. Menyiasati atau strategi yang menjadi salah satu pembeda antara administrasi dengan manajemen.
5. Belajar dari berbagai sumber seperti keadaan sosial-politik, sosial-kultural, sosial-ekonomi, maupun sosial-religius.
6. Bertujuan efektif dan efisien.<sup>10</sup>

## B. Proses Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan hasrat untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Dalam proses praktiknya di Indonesia pendidikan Islam setidak-tidaknya dapat di kelompokkan ke dalam lima jenis lembaga, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah, yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di sebut sebagai pendidikan kegamaan (Islam) formal, seperti pondok pesantren/Madrasah Diniyah (Ula, wustha, 'Ulya, dan Ma'had 'Ali).
2. PAUD/RA, BA, TA, Madrasah da pendidika lanjutan seperti IAIN, STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Agama.
3. Pendidikan Usia dini, RA, BA, TA, sekolah/perguruan tinggi yang diselenggaraakan di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam.
4. Pelajaran agama Islam di sekolah/ madrasah/perguruan tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, dan atau sebagai program studi.
5. Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majelis taklim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat, atau pendidikan (Islam) melalui jalur pendidikan nonformal, dan informal.

Ruang lingkup proses praktik manajemen pendidikan Islam dalam definisi kedua yang dikemukakan oleh Muhammin, yaitu sistem pendidikan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat juga mencakup:

1. Pendidik/guru/dosen kepala Madrasah/sekolah atau pimpinan perguruan Tinggi dan / atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.
2. Komponen-komponen pendidikan lainnya seperti tujuan, materi/bahan ajar, alat/media/ sumber belajar, metode, evaluasi, lingkungan/konteks, manajemen dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam atau yang bercirikhas Islam.<sup>12</sup>

Dengan demikian proses manajemen secara umum meliputi manajemen kelembagaan dan program pendidikan Islam serta aspek spirit Islam melekat pada setiap aktivitas

pendidikan. Selain itu proses manajemen pendidikan Islam sangat kompleks dan bersaing ketat di masa digital saat ini, persaingan antara pendidikan semakin tajam karena pada masa sekarang harus menghadapi persaingan global, untuk itu kualitas tenaga pendidik atau jasa harus sesuai yang diharapkan oleh pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan dan mampu bersaing terhadap dunia pendidikan. Seperti halnya kualitas, definisi *total quality management* (TQM) juga ada bermacam-macam. TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistic yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Definisi lainnya menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau karyawan dan betujuan untuk terus-menerus meningkatkan nilai yang diberikan pada pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi TQM diatas, maka dapat disimpulkan TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Dalam menjalankan usaha TQM terdapat beberapa komponen unsur yang paling utama dalam TQM, yaitu: fokus pada pelanggan, obsesi pada kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.<sup>14</sup> Deming menyatakan, bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran mendefinisikan kualitas sebagai *fitness of use* dan Crosby sebagai *conformance to requirement*, maka Deming mendefinisikan dalam bukunya Nur Nasution yaitu kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan.<sup>15</sup> Adapun menurut Feigenbaum dalam bukunya Nur Nasution menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.<sup>16</sup> Deming menganjurkan penggunaan SPG (yang dikembangkan pertama kali oleh Shewhart) agar perusahaan dapat membedakan penyebab sistematis dan penyebab khusus dalam menangani kualitas. Siklus Deming adalah model pebaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas empat komponen utama secara berurutan yaitu Siklus PDCA (Plan, Do, Check, dan Act).<sup>17</sup> Hal itu yang akan dihubungkan dengan manajemen pendidikan Islam.

Manajemen pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang mana semua sumber dayanya itu digunakan, agar tercapainya kerjasama yang produktif, efisien dan efektif bersama

dengan pihak luar untuk kesejahteraan.<sup>18</sup> Manajemen adalah kegiatan usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan pengawasan tindakan organisasi untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan manajemen pendidikan Islam ialah proses dalam penggunaan sumber daya dengan bantuan pihak lain dan berkoordinasi dengan mereka supaya tujuannya tercapai secara efektif, efisien dan produktif.<sup>20</sup> Adapun proses manajemen pendidikan Islam secara umum meliputi, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan staf (staffing), dan pengontrolan (controlling, monitoring dan evaluating). Adapaun penjelasan lebih jelas ialah:

1. Perencanaan (planning)

Gorton mengatakan bahwa pengelola lembaga pendidikan dalam menjalankan manajemen pendidikan harus melakukan serangkaian perencanaan yang terkait dengan sesuatu yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fisik pendidikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh komunitas pendidikan yang ada. Kebutuhan fisik tersebut misalnya jumlah ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, ruang khusus kesehatan,, ruang khusus pembinaan organisasi, ruang kantor kepala sekolah, ruang guru, tata usaha, kantin, dan sebagainya.
- b) Perencanaan dilakukan secara komprehensif untuk mendukung perencanaan secara umum. Perencanaan yang dibuat harus memiliki keterkaitan antara perencanaan di setiap bagian manajemen, seperti perencanaan bidang kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, hubungan masyarakat, keuangan, dan bidang kepegawaian.
- c) Implementasi perencanaan, Seluruh perencanaan yang telah dibuat harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini, perencanaan disusun oleh setiap pembantu kepala sekolah sesuai bidangnya masing-masing melalui persetujuan dan pengesahan kepala sekolah. Oleh karena itu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan isi perencanaan adalah wakil kepala sekolah sesuai bidangnya masing-masing.
- d) Pengembangan program bersifat efektif dan efisien Nilai efektifitas sangat penting diperhatikan dalam menyusun perencanaan untuk mencapai sasaran yang tepat dan akurasi tujuan yang maksimal. Demikian pula efisiensi diperlukan untuk menngukur modal yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan disusun berdasarkan rangking tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di suatu lembaga pendidikan.

- e) Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi staf. Perencanaan merupakan faktor paling penting dalam manajemen. Kegagalan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kehancuran,<sup>22</sup> atau dengan ungkapan lain failing to plan is planning to fail. (gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal) Perencanaan adalah awal dari seluruh proses manajemen sebelum melangkah pada proses yang lain, seorang manajer harus memusatkan perencanaannya terlebih dahulu.<sup>23</sup> Oleh karena itu perencanaan harus dibuat dengan memperhatikan kondisi staf yang akan melaksanakan isi rencana tersebut.

## 2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian dimaksudkan untuk menempatkan posisi instrumen organisasi pada tempat yang sesuai untuk menjalankan roda organisasi.<sup>22</sup> Dalam pendidikan, perorganisasian berarti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan, dan dilaksanakan oleh satuan tim (staf) yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tersebut harus diatur dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai produktifitas kerja yang maksimal.<sup>25</sup> Berbeda dengan Gorton, Schroeder mengatakan bahwa tujuan utama pengorganisasian adalah untuk mengelola tenaga kerja untuk mencapai prestasi yang memuaskan dalam kendala yang sedang dihadapi, bukan prestasi maksimum. Oleh karena itu seorang manajer harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan psikologis pegawai di lingkungan kerjanya. Prestasi yang memuaskan dapat membantu sebuah organisasi untuk tetap survive, karena dapat menarik orang, modal, dukungan pemerintah dan pelanggan.<sup>23</sup>

Perbedaan pandangan para ahli tersebut hanyalah pada tujuan utama saja. Sebenarnya perbedaan tersebut dapat dikompromikan. Hasil yang maksimal serta kepuasan kerja dapat dijadikan tujuan utama pengorganisasian.

## 3. Kepemimpinan staf (staffing)

Kepemimpinan staf atau staffing dimaksudkan untuk mendorong kinerja organisasi (pendidikan). Demikian pula penempatan staf pada bidang yang sesuai dengan keahliannya adalah bagian dari kepemimpinan staf. Staffing juga meliputi penggerahan, (directing), kordinasi, dan penempatan.<sup>24</sup>

Edwin mengatakan, bahwa tidak mudah menempatkan dan memilih seorang staf untuk suatu posisi. Penempatan staf yang adil dan baik hendaknya memperhatikan beberapa pertimbangan dari golongan minoritas, agama, kebangsaan, organisasi sosial, dan lain-lain. Acuan pertimbangan yang ditawarkan Edwin memang bersifat umum. Akan tetapi hal itu juga dapat direlevansikan dengan manajemen pendidikan. Hal ini dapat dicontohkan dengan seorang kepala sekolah dalam memilih seorang staf untuk bertugas dalam bidang kesiswaan, ia juga harus mempertimbangkan hal tersebut di atas. Di sini dapat dicontohkan sebuah madrasah yang menerapkan sistem pengelompokan siswa dengan mengacu pada perbedaan gender, maka dalam memilih staf untuk membidangi kesiswaan harus mempertimbangkan agama, latar belakang organisasi, jenis

kelamin, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kondisi pembimbing yang terlalu berbeda dengan kondisi umum siswa akan menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.

#### 4. Pengontrolan (controlling, monitoring dan evaluating).

Pengontrolan biasa disebut dengan pengawasan. Fungsi dari pengawasan adalah mengidentifikasi efektifitas organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Demikian pula pengawasan meliputi efisiensi dari masing-masing program, pengorganisasian, dan pemimpinan. Pengawasan diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan organisasi (pendidikan) pada masa selanjutnya.<sup>25</sup>

Dalam kasus manajemen pendidikan, pengontrolan mutlak dibutuhkan untuk bahan evaluasi perbaikan program pada masa yang akan datang. Di samping itu semangat kerja para staf akan termotivasi apabila pimpinan sekolah memberikan arahan dan penghargaan terhadap prestasi kerja mereka.

### C. Isu-isu Manajemen Pendidikan Islam

Beberapa pembahasan diatas yaitu manajemen pendidikan Islam suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pendidikan Islam serta tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa isu-isu yang dihadapi dalam manajemen pendidikan Islam yaitu, tantangan globalisasi, kualitas tenaga pendidik, kurikulum dan pembelajaran, Metode pembelajaran yang belum inovatif, Sarana dan prasarana yang belum memadai, Manajemen keuangan yang belum transparan , Kurangnya kerjasama dengan pihak lain, pendanaan, Evaluasi dan pengendalian, dan peran masyarakat. Lebih jelas lagi antara lain:

#### 1. Tantangan globalisasi

Pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa, karena semua kegiatan produktif akan memanfaatkan keluaran dari sistem pendidikan nasional. Agar para tenaga pendidik tersebut dapat berkontribusi secara optimal dalam dunia kerja, maka perlu diupayakan peningkatan kualitas dan relevansi kepakaran dan keterampilan dalam proses pendidikan. Proses pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik dengan keterampilan profesional yang tinggi guna dunia kerja. Oleh karena ini persiapan secara kompetensi, keahlian dan keterampilan harus benar-benar teruji, sehingga Indonesia sebagai negara yang tidak akan tersisihkan karena mampu bersaing sebagai negara penghasil bukan sebagai negara penikmat, yang artinya mampu menciptakan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain sebagai bentuk adaptasi dari perubahan global yang terjadi. Untuk itu system administrasi bisa saja mengurangi kebutuhan jumlah tenaga pendidik di sekolah.<sup>26</sup>

Menurut Rusniati tantangan yang dihadapai dunia pendidikan saat ini, antara lain sebagai berikut:

---

- a) Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral. Terjadinya globalisasi pada bidang budaya, etika dan moral menuntut dunia pendidikan untuk memberikan pembelajaran yang bisa memberikan rasa cinta tanah air dan bisa memfilter dampak dari globalisasi tersebut yaitu sebuah budaya atau nilai yang masuk ke negara kita yang dibawa oleh negara lain. Semakin canggihnya penggunaan teknologi dan sosial media semakin memudahkan informasi atau budaya lain menyebar dengan cepat sehingga menjadi sebuah trend, gaya, dan suatu kebiasaan yang dianggap keren, padahal ada beberapa yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai pada negara Indonesia. Contohnya seperti trend fashion, seperti yang bisa kita lihat pakaian-pakaian yang dibawa oleh orang luar negeri seperti di bali para bule menggunakan bikini dan baju yang cukup terbuka. Contoh lainnya seperti kebiasaan orang-orang barat jika bertemu antara lawan jenis cara menyapa mereka dengan mencium pipi atau dengan memeluk.
- b) Persaingan alumni sekolah dan perguruan tinggi dalam meraih pekerjaan semakin ketat. Terjadinya persaingan yang cukup ketat dalam beberapa bidang salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit, dengan demikian pendidikan dituntut untuk menghasilkan generasi yang bisa bersaing yang memiliki skil dan kemampuan sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mempunyai usaha sendiri.
- c) Hasil-hasil survei internasional tentang indek pendidikan masih rendah. Hasil-hasil Survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juri kunci jika dibandingkan dengan negaranegara tetangga.
- d) Masalah rendahnya tingkat social-capital yaitu sikap amanah dari seseorang.<sup>27</sup>

Sementara itu dalam rangka memenuhi kebutuhan industrialisasi dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi, maka kebutuhan akan menguasai iptek suatu keharusan dalam membangun masa depan bangsa. Menurut Wardiman, dampak dari globalisasi ialah:

- a) Dampak budaya Barat dan sekulerisme pada pendidikan Islam.
- b) Persaingan dengan lembaga pendidikan lain dalam menarik peserta didik.
- c) Kebutuhan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan Islam.<sup>28</sup>

Menghadapi tantangan globalisasi diatas maka menurut Santoso ada empat cara strategi dalam pendidikan yaitu:

- a) Pendidikan mengembangkan iptek.
- b) Pendidikan untuk pengembangan ketrampilan manajemen.
- c) Pendidikan mengelola kepelautan, lingkungan, KB, dan kesehatan.
- d) Mengintegrasikan pengetahuan
- e) Meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Karena itu munculnya teknologi secara global yang semakin pesat, hal ini juga mempengaruhi di dunia pendidikan, sehingga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan mengembangkan kompetensi yang dimiliki sebagai bentuk meningkatkan mutu dalam menjawab globalisasi. Dalam artikel ini membahas tentang mutu pendidikan di era globalisasi, dimana cara yang diterapkan untuk mempertahankan mutu pendidikan. Pembahasan mengarah pada cara peningkatan mutu di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan syarat wajib bagi Lembaga pendidikan sebagai cara untuk mempertahankan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Sehingga masukan, proses sampai hasil dari Lembaga telah memenuhi keinginan dari masyarakat secara umum dan lulusannya mampu bersaing di dunia kerja. Dalam mewujudkan kualitas pendidikan tersebut maka harus memhatikan ciri/karaktersitik.<sup>30</sup>

Untuk menghasilkan lulusan unggul yang dapat mengantisipasi era globalisasi diperlukan pembaharuan pendidikan yaitu:

- a) Program wajib belajar 12 tahun.
- b) Orientasi pendidikan pada aspek mutu.
- c) Pengembangan iptek.
- d) Meningkatkan proses belajar siswa.
- e) Kelengkapan sarana prasarana.
- f) Disiplin etos kerja yaitu bertanggungjawab.

## 2. Kualitas tenaga pendidik

Kualitas guru di lembaga pendidikan Islam masih belum merata. Ada guru yang kompeten dan ada juga yang belum kompeten. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal. Selain itu, masalah rendahnya kualitas tenaga pendidik masih menjadi persoalan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, namun persoalan rendahnya kualitas pendidikan belum dapat diatasi. Salah satunya ialah kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan terlatih dalam bidang pendidikan Islam, rendahnya gaji dan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Islam, dan kesulitan dalam menarik minat generasi muda untuk menjadi guru agama. Untuk itu pendidikan agama merupakan investasi paling utama bagi bangsa, pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan.<sup>31</sup>

Sistem pendidikan nasional hingga saat ini belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, berbagai analisis mengenai penyebab rendahnya kualitas pendidikan, antara lain karena masalah manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, dan penanganan masalah bukan pada ahlinya.<sup>32</sup> Sehingga tujuan

pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan.

Menurut tujuan utama pendidikan adalah bisa membentuk manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulang apa yang dilakukan generasi.<sup>33</sup> Tenaga pendidik merupakan kunci pokok bagi keberhasilan pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan, oleh sebab itu profesionalisme tenaga pendidik harus ditingkatkan dan dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah telah merancang dan menetapkan standar kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagai usaha untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya. Dapat diidentifikasi beberapa karakteristik tenaga pendidik yang dinilai kompeten secara professional sebagai berikut:

- a) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik.
- b) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.
- c) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.
- d) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.<sup>34</sup>

### 3. Pergantian Kurikulum

Kurikulum memiliki peran penting demi menciptakan generasi muda yang cerdas, berkemampuan, berkarakter, berakhlak, dan menciptakan ide-ide baru, dan dapat bertanggung jawab. Dengan adanya kurikulum yang baru dan terdapat pembaharuan kearah yang positif dan efisien, tentunya akan menciptakan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan nasional yang ditetapkan. Akan tetapi pada pembaharuan kurikulum saat ini, banyak masalah yang muncul sehingga membutuhkan pemecahan dan solusi yang berbeda dalam penanganannya. Agar mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman maka perlu dilakukan usaha penetapan kurikulum baru yang seusai dan efektif. Salah satunya ialah kurikulum pendidikan Islam masih sering dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan pendidikan yang holistik dan terintegrasi. Ada beberapa permasalahan yang dapat menjadikan suatu beban baik oleh pengajar ataupun siswanya, pada kurikulum merdeka. Yaitu:

- a) Kurikulum yang belum responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- b) Pendekatan pembelajaran yang kurang inovatif dan interaktif.
- c) Kurangnya integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran.
- d) Kurangnya pelaksanaan kesejahteraan pendidikan yang tumpang tindih dan tidak merata.<sup>35</sup>

### 4. Metode pembelajaran yang belum inovatif

---

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah sudah berusaha dan berupaya terus mengambil langkah-langkah perbaikan seperti: metode pembelajaran, peningkatan kualitas guru, perubahan dan perbaikan kurikulum, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi sangat disayangkan, upaya dan langkah-langkah tersebut masih bersifat umum dan global, belum menyentuh masalah-masalah yang dihadapi di kelas, seperti mengupayakan mengatasi kesulitan belajar siswa di kelas. Harus disadari bahwa sebaik apapun kurikulum yang dirancang, selengkap apapun sarana dan prasarana yang diadakan, namun jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan dengan tepat oleh guru dan siswa di dalam kelas, maka dipastikan pembelajaran tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Kendala yang paling sering dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah pemilihan model pembelajaran. Hal ini dikarenakan pada saat mengajar guru harus menyesuaikan dengan pembelajaran tematik yang diajarkan.

Kurikulum merdeka lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Kurikulum merdeka merupakan suatu hal yang relatif baru, sehingga dalam implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak guru yang merasa sulit dalam melaksanakan pembelajaran ini. Hal ini terjadi antara lain karena guru belum mendapat pelatihan secara intensif tentang pembelajaran ini. Disamping itu juga guru masih sulit meninggalkan kebiasaan kegiatan pembelajaran yang penyajiannya berdasarkan mata pelajaran/bidang studi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di lembaga pendidikan Islam masih banyak yang tradisional dan kurang menarik bagi peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik menjadi bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Selain itu lembaga pendidikan Islam masih minim dalam inovasi dan kreativitas. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam tertinggal dari lembaga pendidikan lain.

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif akan sangat membantu dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Menurut Komalasari model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan wadah atau bungkus dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.<sup>36</sup>

##### 5. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam masih banyak yang belum memadai. Hal ini menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan islam dinilai sangat penting. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,

kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik” (Undang-Undang RI Tahun 2003). Juga Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2.

Faktor-faktor penghambat manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam dalam mendukung proses belajar siswa antara lain adanya website sekolah yang belum dikelola secara baik dan optimal. Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah karena masih kurangnya kesadaran peserta didik di dalam perawatan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dari pihak sekolah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, serta perlu juga dukungan pemerintah dalam hal pendanaan.<sup>37</sup>

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Beberapa prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip pencapaian tujuan
- b) Prinsip efesiensi
- c) Prinsip administratif
- d) Prinsip kejelasan tanggungjawab
- e) Prinsip kekohesifan

Selain itu, hal ini pula dapat berbagai minat dan motivasi peserta didik, meningkatkan pemahaman karena adanya media belajar, menampilkan data-data yang meraik dan dapat dipercaya, penafsiran data yang mudah, dan informasi yang lebih padat dan berguna.<sup>38</sup>

Pada ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pentingnya suatu sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Makhluk Allah seperti hewan dalam alQur'an dijelaskan bahwasanya hewan dapat pula menjadi suatu alat dalam dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan surat an-Nahl yang memiliki artin yaitu lebah. Ayat ke 68-69 di surat itu Allah menjelaskan yang artinya adalah sebagai berikut:" *Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempullah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.*

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa lebah dapat dijadikan suatu media atau alat bagi orang-orang yang memiliki pikiran untuk mengenal berbagai kebesaran yang dimiliki Allah SWT yang pada akhirnya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Dalam mendidik para sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW pasti selalu menggunakan berbagai alat atau media,

baik itu benda ataupu non-benda. Diketahui bahwa gambar adalah salah satu jenis alat yang dipakai Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada sahabatsahabatnya. Saat ini, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan islam terus mengalami pengembangan seiring berkembangnya juga berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan Islam juga tetap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas k dalam mengembangkan suatu penggunaan alat pendidikan sehingga akan memudahkan dalam proses kelancaran proses pendidikan islam. Akan tetapi penggunaan alat tersebut tetapi berlandaskan dan berdasarkan atas aturan-aturan pendidikan Islam dan mengacu kepada berbagai yang telah akan direncanakan.<sup>39</sup>

#### 6. Manajemen keuangan yang belum transparan

Manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam masih banyak yang belum transparan. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini karena manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.<sup>40</sup>

Secara umum, manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), Pelaksanaan (Akunting) dan tahap penilaian atau evaluasi (Auditing).<sup>41</sup>

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan antara lain:<sup>42</sup>

- a) Transparansi, berarti adanya keterbukaan. Di lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- b) Akuntabilitas, dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama

yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

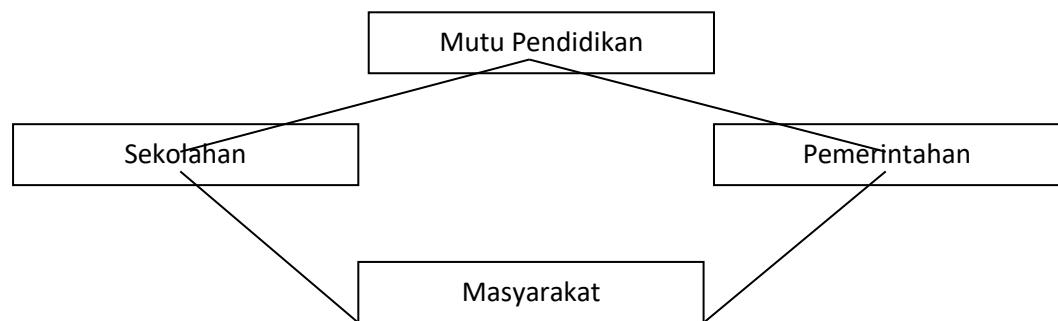
- c) Efektivitas, lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- d) Efisiensi, perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
- e) Keadilan (Equilibrium/keseimbangan), menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat.<sup>43</sup>

#### 7. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain

Lembaga pendidikan Islam masih kurang menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam sulit untuk berkembang. Hal utama yang menjadi fokus pembahasan adalah kurangnya kerjasama antar stakeholder yang memengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Bawa stakeholder ini dipercaya memiliki fungsi masing-masing dalam kaitannya meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Karakteristik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur mutu suatu pendidikan antara lain adalah kebijakan dan kurikulum yang mengatur suatu pendidikan, kualitas dari sumber daya pendidik, sarana prasarana yang mendukung pendidikan, pengelolaan yang dilakukan, dan hasil prestasi dari siswa didik. Semua karakteristik tersebut membutuhkan adanya peran dari setiap stakeholder yang terlibat. Stakeholder yang dimaksud seperti pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Pemerintah di sini merujuk pada otoritas tertinggi yang mengatur jalannya pendidikan. Memberikan kebijakan serta kurikulum yang digeneralisasikan ke semua sektor. Masyarakat merujuk pada orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan sekolah merujuk pada siswa didik, tenaga pengajar, dan kepala sekolah.

Terdapat beberapa stakeholder atau rekan kerja yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Di mana setiap stakeholder tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling terikat satu sama lain. Menurut Hetifah, Stakeholder sendiri diartikan

sebagai seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dan terpengaruh secara positif maupun negatif terhadap kegiatan dan memiliki suatu kepentingan tertentu.<sup>44</sup> Dengan kata lain, peran yang dimiliki masing-masing stakeholder bisa didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu. Baik kepentingan yang menguntungkan diri sendiri maupun yang berada di luar diri tersebut. Adapun gambaran peran stakeholder ialah:



Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan stakeholder di dunia pendidikan ini akan melahirkan sebuah organisasi. Secara singkat, seperti yang dibahas di atas bahwa organisasi adalah tempat berkumpulnya suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bahwa keberadaan organisasi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika di dalam suatu organisasi akan memunculkan sub organisasi yang terkadang memiliki tujuan berbeda. Padahal penting yang namanya memiliki kerjasama antara organisasi dan sub organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.<sup>45</sup> Di dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, adanya kerjasama antar setiap stakeholder dalam suatu organisasi tentu akan memberikan penilaian yang berbeda. Karakteristik peningkatan mutu pendidikan yang sebelumnya sudah dibahas akan berjalan baik apabila masing-masing stakeholder bergerak sesuai dengan fungsinya. Di samping harus menciptakan relasi dan kerjasama yang kuat agar tidak terjadi ketimpangan. Dengan kata lain semua karakteristik di atas membutuhkan peran setiap stakeholder yang terlibat. Stakeholder dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah pemerintah sebagai otoritas tertinggi, masyarakat sebagai pengendali, dan pihak sekolah sebagai pelaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penting adanya kerjasama antar setiap stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan. Bahwa antara satu stakeholder dengan stakeholder lain memiliki hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling memengaruhi satu sama lain. Terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem pendidikan. Jika satu komponen tidak berfungsi, maka akan mengacaukan sistem pendidikan yang ada. Di mana hal itulah yang menjadikan mutu pendidikan sulit untuk berkembang. Diperlukan yang namanya kerjasama nyata antar semua unit agar tidak ada tumpang tindih di masing-masing fungsi. Oleh karenanya, bukan menjadi hal yang mustahil jika semua stakeholder dapat memberikan kontribusi dan

membentuk relasi yang kuat karena memiliki tujuan bersama. Maka masing-masing peran sangat dibutuhkan guna dapat mewujudkan cita-cita kecerdasan bangsa. Melalui adanya kerjasama setiap stakeholder, bisa menjadi salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu yang lain.

#### 8. Penandaan

Sumber dana pemberian pendidikan ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Sumber pemberian pendidikan terdiri dari beberapa bagian:

- a) APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dsb.
- b) Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
- c) Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb.
- d) Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.
- e) Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.

Apa makna data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah, jelas ada masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam dua masalah, yaitu pertama, masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaran sistem pendidikan.

Kedua, masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya.

Mahalnya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Orangtua siswa harus berfikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan. Sehingga muncul kata dalam salahsatu buku Eko Prasetyo kalau “orang miskin dilarang sekolah”. Ada beberapa dampak mahalnya pendidikan ialah:

- a) Lemahnya sumber daya manusia
- b) Lemahnya taraf perekonomian masyarakat
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- d) Ketergantungan pada dana dari pemerintah dan donatur.
- e) Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan.
- f) Ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan.

## REFERENSI

- Abbas, E. W. (2013b). Mewacanakan Pendidikan IPS (Cetakan Kedua). WAHANA Jaya Abadi. <http://eprints.ulm.ac.id/5481/>
- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2016.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arwidayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* Bandung: Widya Padjadjaran, 2017.
- Dwiputri, F. A., Kurniawati, F. N. A., & Febriyanti, N. (2022). Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 198–205. <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.178>. 2022.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, organisasi dan Manajemen edisi keempat. terj. Hasymi Ali Jakarta:Bumi Aksara, 1995.
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPPI, 2017.
- Jurnal, Fauzi, Model Manajemen Pendidikan Islam; Tela’ah atas Pemikiran dan Tindakan Sosial. *At Ta’lim : Jurnal Pendidikan* 2019, 2(2), 19–37. <http://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/attalim/article/view/59>
- Kewuel, Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguanan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi dalam Tata Pendidikan Global. *ERUDIO (Journal of Educational Innovation*, 55-66, 2017.
- Lestari, S. (2018). Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94– 100. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Islam “Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, cet. 2; Jakarta ; Kencana, 2010.

- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Islam “Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, cet. 2; Jakarta ; Kencana, 2010.
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Islam “Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, cet. 2; Jakarta ; Kencana, 2010.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mujamil Qomar, *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam*, Malang, Erlangga, 2007.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasinya*, Cet II, Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, Cet II Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Nasution, *Teknologi Pendidikan*, Cet 1 Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Richard A. Gorton, *School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership* USA:Brown Company Publishers, 1976.
- Rusniati, *Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian kritis terhadap Pemikiran A. Malik Fajar*. Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 16, No. 1, 2015.
- Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung Pustaka Setia 2012.
- Santosa Hamidjojo, lima jurus strategi dasar pendidikan Nasional dalam era globalisasi, mimbar pendidikan, Jurnal Pendidikan No.4 Tahun XI,Desember 1990: Jakarta, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sofwan Manaf, *Pola Manajemen Penyelenggaraan Pondok Pesantren*. Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001.
- Sonia, N. R. (2022). Strategi Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan di Era Globalisasi. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 4429–4443. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2961>
- Syaban, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam*. Al-Wardah, 12(2), 131. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.14>
- Tanjung, *Tafsir Ayat- Ayat Alquran Tentang Manajemen Sarana Prasarana*. (Jakarta: Sabillarrasyad, 2017), 156–183.
- Tarbiyah, F., Iain, K., Balandai, J. A., & Palopo, K. (2024). A. Pendahuluan Perkembangan kehidupan manusia telah memasuki era globalisasi. Di Era ini setiap negara, orgnisasi, dan bahkan individu dapat melakukan interaksi dengan mudah dan cepat. Globalisasi selanjutnya cenderung mengaburkan bahkan meniadakan batas-. 2(1), 64–77.
- Wanto, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smk Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011 / 2012*. Program Studi Agama Islam (Tarbiyah). [http://eprints.ums.ac.id/20377/9/NASKAH\\_PUBLIKASI](http://eprints.ums.ac.id/20377/9/NASKAH_PUBLIKASI)
- Wardiman Djajonegoro, *Pembangunan Perguruan Tinggi dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta, BP 7 Pusat, 1996.
- Wojowarsito, Purwadarminta, *Kamus lengkap Indonesia Inggris*, Hasta, Jakarta: 2000.